

**ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PADA  
PT. REZKI KARYA MEGATAMA  
TALUK KUANTAN**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**SESKAWATI**

**NIM 10973005737**



**PROGRAM S.1**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2013**

**ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PADA  
PT. REZKI KARYA MEGATAMA  
TALUK KUANTAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mengikuti Ujian  
Oral Convrehensive Sarjana Lengkap Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru

**OLEH**

**SESKAWATI**

**NIM 10973005737**



**PROGRAM S.1**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2013**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PADA PT. REZKI KARYA MEGATAMA TALUK KUANTAN**

## **OLEH**

## **SESKAWATI**

*Penelitian ini dilakukan pada PT. Rezki Karya Megatama Taluk Kuantan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Akuntansi Perpajakan yang diterapkan oleh PT. Rezki Karya Megatama telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang sudah ada, seperti Neraca, Laba Rugi dan Surat Pemberitahuan (SPT), dan data primer yaitu berupa hasil wawancara dengan bagian akuntansi tentang tata cara perhitungan pajak yang dilakukan oleh perusahaan.*

*Adapun permasalahan yang ditemui penulis pada penelitian ini yaitu perusahaan tidak membayar angsuran pasal 25 Badan sesuai dengan jumlah yang ada. Disamping itu penulis juga menemukan adanya biaya-biaya yang tidak dapat dibebankan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh sebab itu, harus adanya koreksi fiskal atas laporan keuangan terhadap laba yang disajikan perusahaan.*

*Dari perhitungan besarnya pajak penghasilan PT. Rezki Karya Megatama Taluk Kuantan menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada laba akuntansi komersil, sehingga terdapat perbedaan pada laba akuntansi komersil. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Akuntansi Pajak Penghasilan yang telah dilaksanakan oleh PT. Rezki Karya Megatama Taluk Kuantan belum sesuai dengan Ketentuan Perpajakan.*

*Kata Kunci : Akuntansi Pajak Penghasilan, Laba / Rugi akuntansi (Komersil), Laba Rugi Fiskal, Undang-Undang Pajak Penghasilan*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PADA PT. REZKI KARYA MEGATAMA TALUK KUANTAN”**. Skripsi ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Program Studi Akuntansi Fakultas EkonomidanIlmuSosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, ucapan terima kasih tersebut penulis tujukan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Jomaris dan Ibunda Ratina serta kakakku Susilawati dan suaminya Fadlilzal, dan adekku Trio Oki Saputra serta keponakanku Agil Fardiansyah Fadla, terima kasih atas segala do'adan bantuan yang telah diberikan selama ini baik moril maupun materil.
2. Rektor UIN Suska Riau Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir serta Purek I, II, III dan IV yang telah berjasa memberikan kesempatan kepada Penulis, selama menuntut ilmu di Fakultas EkonomidanIlmuSosial.
3. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas EkonomidanIlmuSosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dony Martias, SE. MM selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan ibu Desrir Miftah, SE, MM. Akselaku Sekretaris Program Studi Akuntansi.
5. Ibu Hesti Wulandari, SE, M.Sc, Akselaku Dosen Konsultasi dalam menyelesaikan Proposal dan Bapak Khairil Hendri, SE, M.Si, Akselaku Pembimbing skripsi yang banyak memberikan dorongan dan pemikiran sampai selesainya skripsi ini.

6. IbuElisanovi, SE, MM.Ak selaku Penasehat Akademik (PA) yang banyak memberikan motivasi dan pemikiran sampai selesainya skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas EkonomidanIlmuSosial UIN SultanSyarif Kasim Riau, yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.
8. Bapak Pimpinan dan beserta staf PT. Rezki Karya Megatama Taluk Kuantan yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada Penulis dalam memperoleh data-data untuk melakukan penulisan skripsi ini.
9. Terima kasih buat orang yang kukagumiyaituabangkuAidilSapari, S.PtdanDrs.Yuhasri,MM dan kakak-kakakkuSendediNopriantiSestri, A.MadanPerialasani, SP.dyang telah memberikan bantuan, dorongan, semangatmotivasi, dan doanya untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-temanku, RifaYani, Mardona, OnyAmbarwati, Nurianti, Fajry Anwar, Siti Aisyah, dan teman-teman Akuntansi angkatan '09 yang telah memberikan bantuan, motivasi serta partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN), Echi, Pepi, Rina, Lina, Tika, Neni, Muthia, AnggadanIzul yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan lagi dengan saran dan kritikan dari semua pihak. Akhirnya penulis mendoakan semoga bantuan yang telah diberikan berkah dan dicatat sebagai suatu amal ibadah oleh Allah SWT.

Pekanbaru, Juni 2013

Seskawati

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	5
1.4. Metode Penelitian.....	5
1.4.1. Lokasi Penelitian.....	5
1.4.2. Jenis dan Sumber Data.....	6
1.4.3. Metode Pengumpulan Data.....	6
1.4.4. Analisis Data.....	6
1.5. Sistematika Penulisan.....	7
<b>II. LANDASAN TEORI</b>	
2.1. Pengertian Akuntansi .....	9
2.2. Laporan Keuangan .....	10
2.2.1. Tujuan Laporan Keuangan.....	10
2.2.2. Bentuk Laporan Keuangan .....	11
2.3. Pengertian Pendapatan .....	11
2.3.1. Penentuan Pendapatan .....	12
2.4. Pajak Penghasilan .....	15
2.4.1. Subjek Pajak Penghasilan .....	15
2.4.2. Objek Pajak Penghasilan.....	18

2.4.3. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak .....	23
2.4.4. Tarif Pajak Penghasilan .....	29
2.5. Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal .....	31
2.5.1. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Akuntansi dan Laporan Keuangan Fiskal.....	32
2.5.2. Penyebab Perbedaan Akuntansi Pajak dan Akuntansi Komersial .....	34
2.6. Pajak Menurut Pandangan Islam.....	41

### **III. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

3.1. Sejarah Singkat Perusahaan .....	44
3.2. Struktur Organisasi .....	45
3.3. Aktivitas Perusahaan.....	49

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Perhitungan Laba Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan .....	51
4.2. Koreksi Fiskal .....	53
4.3. Penyajian Dalam Laporan Keuangan.....	58

### **V. PENUTUP**

5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran.....	61

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pesatnya perkembangan ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan bentuk-bentuk usaha di berbagai sektor.

Pertumbuhan usaha tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Negara melalui pajak yang dibayarkan oleh perusahaan-

perusahaan. Peranan pajak saat ini mendapatkan urutan terpenting dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan

Negara. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun yang tidak langsung dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Secara teoritis pajak mempunyai fungsi sebagai Penerimaan (Budgeter) dan berfungsi sebagai Mengatur (Reguler).

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 dan terakhir di ubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, maka sistem pemungutan pajak yang dianut yaitu *Self Assessment System* yang seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan mulai dari menentukan siapa yang menjadi wajib pajak, menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang, menyetor yang dilakukannya, dan mempertanggungjawabkan semua kewajiban itu dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri. Yang dimaksud dengan Wajib Pajak itu sendiri adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.

Wajib Pajak pribadi adalah orang yang memperoleh penghasilan baik sebagai seorang direktur dari satu, beberapa, atau bahkan ratusan perusahaan atau seorang pemegang saham atau komisaris atau pegawai menengah atau pegawai rendah, pekerja mandiri seperti dokter, notaris, pengacara, Wajib Pajak orang pribadi memiliki resiko mengalami pemeriksaan. Bagi Wajib Pajak orang tertentu, penghasilan diinvestasikan dalam bentuk saham, deposito, tabungan, sewa, atau real property.

Sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 (selanjutnya ditulis KUP (Kitab Undang-Undang Perpajakan)): Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan (Pardiat, 2010).

Berdasarkan pasal 28 ayat 7 KUP (Ketentuan Umum Perpajakan) pembukuan sekurang-kurangnya memuat catatan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta pembelian dan penjualan. Adapun beban pajak penghasilan sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan keuangan harus dipisahkan antara pos kegiatan operasional biasa dan yang tidak umum terjadi serta terjadi yang tidak berulang sebagaimana yang dipersyaratkan dalam lokasi pajak penghasilan antar periode.

Pengertian pembukuan menurut UU KUP (Ketentuan Umum Perpajakan) identik dengan pengertian akuntansi yaitu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang

terjadi dalam perusahaan atau organisasi lain serta penafsiran terhadap hasilnya. Menurut pasal 28 ayat (7) UU KUP, pembuku dapat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (S.A.K), Pada umumnya WP menyelenggarakan pembukuan berdasarkan SAK. Pembukuan berdasarkan SAK berlaku umum dan menghasilkan Laporan Keuangan Komersial (LKK) untuk tujuan menghitung penghasilan Netto Fiscal (Rugi Fiskal) dilakukan penyesuaian fiskal berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pada umumnya catatan atas laporan keuangan mengenai pajak penghasilan haruslah menunjukkan: (1) besarnya pajak terutang untuk tahun berjalan, (2) pengaruh perbedaan waktu terhadap pajak, (3) pengaruh kerugian operasi terhadap pajak (jika ada). Laporan keuangan yang disajikan dalam akuntansi pajak harus lengkap, tidak terdapat data yang tidak terakumulasi dalam laporan keuangan.

PT. Rezki Karya Megatama Taluk Kuantan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor, perusahaan ini mempunyai masalah: 1) jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tidak menggunakan tarif yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu sebesar 25% namun perusahaan menggunakan tarif sebesar 14%, sehingga PPh terutang yang dilaporkan dalam laporan Laba Rugi lebih kecil yaitu sebesar Rp 67.915.820,-, 2) dari pengamatan yang telah dilakukan ternyata dalam perhitungan penyajian beban pajak penghasilan dalam laporan laba/ruginya, belum sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari laporan komersial. Di dalam biaya perjalanan perusahaan memasukkan biaya perjalanan wisata sebesar Rp 7.863.000,- dan biaya sumbangan sebesar Rp 3.763.000,- sebagai pengurang dan penghasilan kena pajak. Perusahaan juga tidak melakukan koreksi pajak atas beberapa transaksi sebagai pengurang dan penghasilan kena

ajak, padahal menurut undang-undang perpajakan biaya tersebut tidak bisa mengurangi penghasilan kena pajak, 3) Disamping itu, perusahaan juga memasukkan biaya hiburan sebesar Rp13.456.000,- sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan menurut Undang-Undang Perpajakan tidak bisa dikurangkan sebagai Penghasilan Kena Pajak apabila tidak ada daftar nominatifnya.

Dengan adanya masalah yang dijumpai dalam laporan keuangan yang disusun oleh bagian akuntansi PT. Rezki Karya Megatama Taluk Kuantan, dan untuk mengetahui pelaksanaan dan penerapan akuntansi Pajak Penghasilan pada perusahaan tersebut, maka penulis tertarik dan berkeinginan untuk meneliti dan membahas secara mendalam, dan akan dituangkan dalam bentuk proposal dengan judul penelitian: **“ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PADA PT. REZKI KARYA MEGATAMA TALUK KUANTAN”**.

## **1.2 PERUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Apakah akuntansi perpajakan yang diterapkan pada PT. Rezki Karya Megatama telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008?”.

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah:

”Untuk mengetahui apakah Akuntansi Perpajakan yang diterapkan PT. Rezki Karya Megatama telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008”.

Adapun manfaat dari penelitian yang diharapkan dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Menambah wawasan penulis mengenai pembukuan yang dihubungkan dengan undang-undang perpajakan.
2. Memberikan bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi pihak perusahaan tentang akuntansi pada penghasilan.
3. Memberikan tambahan referensi bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian untuk permasalahan yang sama.

## **1.4 METODE PENELITIAN**

### **1.4.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini penulis lakukan atau laksanakan pada PT. Rezki Karya Megatama Taluk Kuantan yang beralamatkan di Jalan Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi.

### **1.4.2 Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Jenis Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder mencakup identitas perusahaan, struktur organisasi, serta kegiatan usaha perusahaan, data pembukuan serta catatan akuntansi, seperti Laporan Perhitungan Laba Rugi dan Neraca, serta

data yang berhubungan dengan perpajakannya yaitu Surat Pemberitahuan (SPT) Tahun 2012 dan Surat Setoran Pajak (SSP).

b. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini di dapat dari bagian akuntansi dan bagian pelaporan pajak perusahaan.

### 1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh penulis dengan melakukan dua metode yaitu:

a. Wawancara,

yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan bagian akuntansi dan kegiatannya serta apihak-pihak lain yang berkompeten mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data sekunder berupa laporan keuangan dan Surat Pemberitahuan (SPT).

### 1.4.4 Analisis Data

Dalam penganalisaan data, maka penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara membandingkan data dan fakta-fakta dan menghubungkannya dengan teori-teori yang ada untuk mendukung pembahasannya dan memperoleh suatu kesimpulan.

## 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam memberikan gambaran mengenai proposal ini yang akan disusun secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan.

## BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan landasan teori tentang pengertian akuntansi, laporan keuangan, pajak penghasilan, subjek dan objek pajak penghasilan, perhitungan pajak penghasilan, tarif pajak penghasilan, undang-undang pajak penghasilan, laporan keuangan komersial dan fiskal, biaya yang boleh dan tidak boleh dikeluarkan dan pajak menurut pandangan Islam.

## BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini merupakan uraian secara garis besar mengenai gambaran umum perusahaan, sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan aktivitas perusahaan.

## BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang perhitungan labarugid dan beban pajak penghasilan menurut perusahaan (komersial), perhitungan labarugid dan beban pajak penghasilan menurut undang-undang perpajakan.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari perbandingan hasil penelitian dengan teori yang ada dan memberikan saran-saran yang diharapkan berguna bagi perusahaan.





## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 PENGERTIAN AKUNTANSI**

Menurut Manurung (2011), Akuntansi adalah proses mencatat semua kejadian yang bersifat keuangan (disebut transaksi) dan melaporkannya dalam bentuk yang lazim disebut laporan keuangan untuk dikomunikasikan kepada para pengguna.

Sedangkan pengertian akuntansi menurut *Accounting Principles Board (APB) Statement No. 4* (Harahap, 2004) adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya adalah memberikan fungsi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam memilih keputusan terbaik diantara beberapa alternatif keputusan.

Berdasarkan defenisi yang dikemukakan oleh beberapa para ahli tersebut, menunjukkan bahwa akuntansi bukan hanya mencakup fungsi pencatatan dalam menghasilkan suatu informasi keuangan akan tetapi juga menyangkut fungsi lainnya yang pada dasarnya bertujuan menyediakan informasi yang bersifat finansial kepada siapa saja yang memerlukan data informasi tersebut dengan demikian akuntansi dapat diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan yang sifatnya lebih luas dari pada teknik-teknik pencatatan semata.

#### **2.2 LAPORAN KEUANGAN**

Menurut Sadeli (2010), laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu. Perubahan posisi keuangan menunjukkan kemajuan perusahaan, memberikan gambaran tentang apakah perusahaan memperoleh laba dalam melaksanakan

kegiatannya dan apakah perusahaan mengalami perkembangan yang menunjukkan manajemen telah mengelolah perusahaan dengan berhasil.

### **2.2.1 Tujuan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses atau kegiatan akuntansi satu kesatuan usaha. Laporan itu diperlukan oleh pihak yang berkepentingan, antara lain: manajer perusahaan, pemilik perusahaan, bank kreditor, investor, pemerintah dan lembaga lain.

Tujuan umum laporan keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang kekayaan dan kewajiban.
- b. Menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang perubahan kekayaan bersih perusahaan sebagai hasil dari kegiatan usaha.
- c. Menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang perubahan kekayaan bersih yang bukan berasal dari kegiatan usaha.
- d. Menyajikan informasi yang dapat membantu para pemakai dalam menaksir kemampuan perusahaan memperoleh laba.
- e. Menyajikan informasi lain yang sesuai/relevan dengan keperluan para pemakainya.

### **2.2.2 Bentuk Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disajikan dalam dua bentuk, yaitu:

1. Posisi keuangan pada suatu saat, yaitu yang lebih dikenal dengan neraca (Balance Sheet).
2. Perubahan posisi keuangan untuk suatu periode, yaitu terdiri dari:
  - 1) Laporan rugi/ laba (income statement).
  - 2) Laporan perubahan modal (capital statement) atau untuk perusahaan dengan bentuk perseroan terbatas dikenal dengan laporan laba yang ditahan (retained earning).

## **2.3 PENGERTIAN PENDAPATAN**

Ikatan Akuntansi Indonesia (2004:23:2) memberikan definisi pendapatan dalam PSAK No. 23 sebagai berikut:

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Dari definisi diatas dinyatakan bahwa, pendapatan itu hanya terdiri dari arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang diterima dan dapat diterima oleh perusahaan untuk keperluan perusahaan, sedangkan jumlah uang ditagih atas nama pihak ketiga seperti pajak pertambahan nilai bukan merupakan manfaat ekonomi yang mengalir kedalam perusahaan dan tidak dapat menyebabkan terjadinya kenaikan ekuitas dan karena itu harus dikeluarkan dari pendapatan.

### **2.3.1 Penentuan Pendapatan**

Pendapatan harus diukur dengan nilai imbalan yang wajar untuk diterima atau yang dapat diterima, penentuan pendapatan merupakan hal yang paling pokok dalam perhitungan nilai laba rugi suatu kegiatan perusahaan, oleh karena itu perlu ketelitian dalam menentukan suatu pendapatan.

Dalam hal penyerahan barang, sering dijumpai adanya perbedaan antara saat dilakukan persetujuan untuk menjual dengan saat penyerahan barang, oleh karena adanya perbedaan tersebut perlu adanya pisah batas secara layak dan konsisten pada awal dan akhir periode penghitungan laba rugi dapat menggambarkan hasil yang sewajarnya untuk satu periode tersebut.

Dengan adanya perbedaan diatas, maka pada saat pengakuan dalam Standar Akuntansi keuangan pendapatan ditentukan sebagai berikut:

#### **a. Penjualan Barang**

Pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila kondisi berikut terpenuhi:

1. Perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli.
2. Perusahaan tidak lagi pengelola atau pengembalian efektif barang yang dijual.
3. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan handal.
4. Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir pada perusahaan tersebut.
5. Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan handal.

#### **b. Penjualan Jasa**

Bila hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan handal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan dan tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca.

Hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan handal bila seluruh kondisi berikut terpenuhi:

1. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal.
2. Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diproses perusahaan.
3. Tingkat penyelesaian dari satu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan handal.
4. Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan handal. Bila hasil transaksi yang meliputi penjualan jasa tidak dapat

diestimasi dengan handal, pendapatan yang diakui hanya yang berkaitan dengan beban yang telah diakui yang dapat diperoleh kembali.

**c. Bunga, Royalti, dan deviden.**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007), pendapatan yang timbul dari penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalty, dan deviden harus diakui atas dasar sebagai berikut:

1. Bunga harus diakui proporsi waktu yang memperhitungkan hasil efektif aktiva tersebut.
2. Royalti harus diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan.
3. Dalam metode biaya cost, deviden tunai harus diakui bila hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

**d. Komponen-komponen Perhitungan Rugi Laba**

Laporan keuangan yang disusun oleh suatu perusahaan pada setiap akhir periode, berguna bagi pihak-pihak dalam menilai kinerja perusahaan seperti pihak pemilik, pihak kreditor, investasi dan pemerintah, salah satu bentuk laporan yang mereka butuhkan itu adalah laporan rugi laba dalam suatu periode waktu.

Secara umum ada dua konsep yang biasa dan lazim dipergunakan dalam laporan rugi laba suatu perusahaan, yakni:

1. Konsep laba operasi.
2. Konsep laba *all-inclusive* (laba komprehensif).

Letak perbedaan kedua konsep ini terletak pada, perlakuannya terhadap pos-pos luar biasa dan koreksi masa lalu. Konsep laba operasi hanya memasukkan atau memuat pos-pos yang berasal dari operasi normal saja atau berulang-ulang terjadinya. Sedangkan pos-pos luar biasa dan koreksi masa lalu dicatat langsung pada perkiraan laba yang ditahan. Sedangkan konsep laba *all-*

*inclusive* memuaskan semua pos-pos, baik yang berasal dari operasi normal perusahaan maupun pos-pos luar perusahaan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007), adapun komponen perhitungan rugi laba menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah, sebagai berikut:

Penjualan  
Beban Pokok Penjualan  
**Laba Bruto**  
Penyusutan  
Beban Administrasi dan Penjualan  
**Laba Bersih Sebelum Pajak dan Pos Luar Biasa**  
Pajak Penghasilan  
**Laba Bersih.**

## **2.4 PAJAK PENGHASILAN**

### **2.4.1 Subjek Pajak Penghasilan**

Menurut Purwono (2010), subjek pajak merupakan segala sesuatu yang berpotensi untuk menerima dan memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran dikenakannya pajak penghasilan.

Adapun yang menjadi Subjek Pajak Penghasilan , yaitu:

1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
3. Badan
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Subjek Pajak dalam Negeri yang terdiri dari:
  - a. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu:
    - a) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan

- b) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
  - b. Subjek Pajak Badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

    - a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
    - c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
    - d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.
  - c. Subjek Pajak Warisan,

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2. Subjek Pajak Luar Negeri yang terdiri dari:
- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.
  - b. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

Adapun yang tidak termasuk dalam Subjek Pajak Penghasilan, yaitu:

1. Kantor perwakilan Negara asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
  - a. Bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
  - b. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi Internasional, dengan syarat:
  - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
  - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat perwakilan organisasi Internasional, dengan syarat:
  - a. Bukan warga Negara Indonesia.
  - b. Tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.
5. Unit tertentu dari badan pemerintah dengan syarat:
  - a. Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Dibiayai dari APBN/APBD.
  - c. Penerimaan lembaga tersebut masuk keanggaran pemerintah.
  - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat fungsional Negara.



### **2.4.2 Objek Pajak Penghasilan**

Menurut Resmi (2009), yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Agoes (2012), dalam pasal 4 ayat (1) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang merupakan Objek Pajak adalah:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, grafikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini,
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan,
3. Laba usaha,
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai penggantian saham atau penyertaan modal,
  - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
  - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan, lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan dalam perusahaan penambangan.
- 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 10. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- 11. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala,
- 12. Keuntungan selisi kurs mata uang asing.
- 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- 14. Premi asuransi.
- 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- 17. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.
- 18. Imbalan Bunga sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

## 19. Surplus Bank Indonesia.

Menurut Mardiasmo (2011), bagi Wajib Pajak dalam Negeri, yang menjadi Wajib Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan Wajib Pajak Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

Adapun yang tidak termasuk dalam Objek Pajak penghasilan, yaitu:

1. a). Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.  
b). Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan, diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Warisan
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah,

kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit).

5. Dividen atau bagian yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam Negeri, koperasi, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
  - b) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25 % dari jumlah modal yang disetor.
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagai mana dimaksud pada jangka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal yang ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

- a) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  - b) Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa efek di Indonesia.
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dibidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

### **2.4.3 Penghitungan Penghasilan Kena Pajak**

Menurut Mardiasmo (2009), besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak badan dihitung sebesar penghasilan netto. Sedangkan untuk Wajib Pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak (WP badan) = penghasilan netto

Penghasilan Kena Pajak (WP orang pribadi) = penghasilan netto – PTKP

Penghitungan besarnya Penghasilan Netto bagi Wajib Pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

### a. Menggunakan Pembukuan

Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak dapat dirumuskan sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak (WP Badan)	Besarnya
= Penghasilan netto	Penghasilan
= Penghasilan bruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh	Kena Pajak bagi
	Wajib Pajak
	dalam Negeri
Penghasilan Kena Pajak (WP Orang Pribadi)	dan Bentuk
=Penghasilan netto – PTKP	Usaha Tetap,
=(Penghasilan bruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh) – PTKP	ditentukan

berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk:

1. Biaya yang secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
  - a. Biaya pembelian bahan
  - b. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, grafikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang
  - c. Bunga, sewa, dan royalty
  - d. Biaya perjalanan
  - e. Biaya pengolahan limbah
  - f. Premi asuransi
  - g. Biaya promosi dan tunjangan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- h. Biaya administrasi
  - i. Pajak, kecuali Pajak Penghasilan.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
  3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
  4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
  5. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
  6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
  7. Biaya mahasiswa, magang, dan pelatihan
  8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
    - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
    - b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak
    - c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang Negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah hutang tertentu
    - d. Syarat sebagaimana pada huruf c tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil.

9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
14. Kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya (minimal 5 tahun).

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap tidak boleh dikurangkan:

1. Pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibagikan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
  - a. Cadangan utang tak tertagih untuk Usaha Bank dan Badan Usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen dan perusahaan anjak piutang
  - b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  - c. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan



- d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
  - e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan
  - f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi asuransi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
  5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  6. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
  7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali:
    - a. Sumbangan yang diperbolehkan dikurangkan.
    - b. Zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
    - c. Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
  8. Pajak Penghasilan.

9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan.
12. Biaya-biaya (pengeluaran) untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang:
  - a. Dikenakan biaya yang bersifat final.
  - b. Bukan Objek PPh.
13. Biaya-biaya (pengeluaran) untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang PPh-nya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.

**b. Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto**

Apabila dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak-nya Wajib Pajak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto, besarnya penghasilan netto adalah sama besarnya dengan besarnya (persentase) Norma Penghitungan Penghasilan Netto dikalikan dengan jumlah peredaran usaha atau penerimaan bruto pekerjaan beban setahun.

Wajib Pajak yang boleh menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto adalah Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000 per tahun.
2. Mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun buku.
3. Menyelenggarakan pencatatan.

#### 2.4.4 Tarif Pajak Penghasilan

Tujuan hukum adalah memberikan keadilan, baik prinsip maupun pelaksanaan. Salah satunya adalah dalam pemungutan pajak. Adapun alat untuk memberikan keadilan adalah pengenaan tarif.

##### a. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

**Tabel II.1: Tarif Pasal 17 Ayat (1) Pajak Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
0 s/d Rp. 50.000.000,00	5%
Diatas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 250.000.000,00	15%
Diatas Rp. 250.000.000,00 s/d Rp. 500.000.000,00	25%
Diatas Rp. 500.000.000,00	30%

1. Tarif 10 % atas penghasilan berupa deviden yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dalam Negeri dan bersifat final yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 menegaskan pembayaran PPh tersebut dipotong oleh pihak pembayar deviden.
3. Tarif tertinggi bagi Wajib Pajak orang dalam Negeri dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

##### b. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Dan Bentuk Usaha Tetap

Tarif Umum PPh Badan, yaitu:

1. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam Negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%.

2. Tarif pajak bagi Wajib Pajak badan dalam Negeri dan bentuk usaha tetap, mulai berlaku sejak tahun pajak 2010, diturunkan menjadi 25%.
3. Wajib Pajak badan dalam Negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari pada tarif yang berlaku.

## **2.5 LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DAN FISKAL**

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sedangkan menurut Suandy (2011), laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan undang-undang perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak.

Dalam Laporan seri harmonisasi standar akuntansi, praktik penyusunan laporan keuangan fiskal sebagai solusi antara ketentuan akuntansi dan ketentuan pajak terdiri atas tiga pendekatan:

1. Ketentuan pajak secara dominan mewarnai praktik akuntansi. Dalam pendekatan pertama, laporan keuangan, walaupun disusun berdasarkan prinsip akuntansi, sangat diwarnai oleh ketentuan perpajakan. Wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan perpajakan tanpa kelonggaran terhadap ketidaksamaan prinsip akuntansi dan ketentuan perpajakan. Pada pendekatan ini ada dua perangkat pembukuan, yaitu untuk kepentingan komersial dan untuk kepentingan fiskal.
2. Pada pendekatan kedua ini, Wajib Pajak bebas menyelenggarakan pembukuannya dengan prinsip dan metode akuntansinya. Laporan keuangan fiskal disusun terpisah di luar proses pembukuan, sering disebut sebagai *extra comptable*. Laporan keuangan fiskal disusun

melalui proses rekonsiliasi antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal, sehingga laporan yang dihasilkan dari *extra comptable* tersebut fungsinya hanya sebagai tambahan laporan keuangan komersial. Pendekatan kedua ini lebih banyak digunakan sebagai pilihan, yaitu dengan menyusun laporan keuangan fiskal melalui rekonsiliasi.

3. Pendekatan ketiga menyatakan ketentuan perpajakan sebagai sisipan Standar Akuntansi Keuangan atau pendekatan dengan prinsip *common basis*. Dalam dasar ini laporan keuangan disusun mengikuti Standar Akuntansi Keuangan, tetapi apabila terdapat aturan lain dalam akuntansi komersial, maka preferensi diberikan kepada ketentuan perpajakan.

### **2.5.1 Rekonsiliasi Laporan Keuangan Akuntansi dengan Laporan Keuangan Fiskal**

Menurut Zain (2007), rekonsiliasi adalah penyesuaian antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal melalui perbedaan permanen dan perbedaan sementara atau koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif.

Menurut Agoes (2012), rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/ laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Koreksi fiskal dapat dibedakan antara beda tetap dan beda waktu. Perbedaan antara akuntansi dan fiskal dapat dibedakan menjadi beda tetap/ permanen (*permanent differences*) dan beda waktu/ sementara (*timing differences*).

#### **a. Perbedaan Tetap/ Permanen (Permanent Differences)**

Perbedaan tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan pajak, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi komersial namun tidak diakui menurut fiskal, atau sebaliknya.

Beda tetap biasanya timbul karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal berikut dikeluarkan dari perhitungan Penghasilan Kena Pajak:

- a. Penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final (pasal 4 ayat (2) UU PPh).
- b. Penghasilan yang bukan objek pajak (Pasal 4 ayat (3) UU PPh).
- c. Pengeluaran yang tak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajiban (pasal 9 ayat (1) UU PPh).
- d. Biaya yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final.
- e. Penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura.
- f. Sanksi perpajakan.

**b. Perbedaan Waktu/ Sementara (Timing Differences)**

Perbedaan waktu/ sementara adalah perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya, secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi tetap berbeda alokasi setiap tahunnya.

Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara pajak dengan akuntansi dalam hal:

- a. Akrual dan realisasi
- b. Penyusutan dan amortisasi
- c. Penilaian persediaan
- d. Kompensasi kerugian fiskal

## **2.4.2 Penyebab Perbedaan Akuntansi Pajak dengan Akuntansi Komersial**

### **a. Adanya Pengeluaran/Beban/Biaya Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto (Deductible Expenses).**

Beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah pengeluaran/ beban/ biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat atas pengeluaran tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam Pasal 6 Ayat (1), biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebagai berikut:

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk:
  - a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
    1. Biaya pembelian bahan.
    2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
    3. Bunga, sewa, dan royalty.
    4. Biaya perjalanan.
    5. Biaya pengolahan limbah.
    6. Premi asuransi.
    7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

8. Biaya administrasi.
  9. Pajak kecuali Pajak Penghasilan.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
  - c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
  - d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
  - e. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
  - f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
  - g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
  - h. Piutang yang nyata yang tidak dapat ditagih, dengan syarat:
    1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
    2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.
    3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang Negara, dan adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah hutang tertentu.



4. Syarat pada huruf c) tidak berlaku untuk menghapuskan piutang tak tertagih debitur kecil yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- n. Biaya Entertainment.

Biaya entertainment dan sejenisnya sering juga dibuat dengan biaya reparasi, jamuan, dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Pembebanan biaya-biaya tersebut dengan SE Dirjen Pajak No. 27 tahun 1986 dapat dibebankan sebagai biaya dengan syarat Wajib Pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungan dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan.

Syarat-syarat formal yang harus dipenuhi terhadap biaya-biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan, yaitu Wajib Pajak harus melampirkan daftar nominatifnya pada Surat Pemberitahuan Tahunan seperti berikut:

- 1) Nomor urut
- 2) Tanggal entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan
- 3) Nama tempat entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan
  - a. Alamat “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan
  - b. Jenis “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan
  - c. Jumlah (Rp) “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan
- 4) Relasi usaha yang diberikan “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan:
  - a. Nama
  - b. Posisi
  - c. Perusahaan
  - d. Jenis usaha

**Table II.2 :Daftar Nominatif Biaya Entertainment dan Sejenisnya Tahun Pajak 2011, yaitu:**

No	Pemberian Entertainment dan Sejenisnya					Relasi usaha yang diberikan Entertainment dan sejenisnya			Ket
	Tanggal	Tempat	Alamat	Jenis	Jumlah (Rp)	Nama	Posisi	Nama Perusahaan	

- (2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun,

(3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

**b. Adanya Pengeluaran/Beban/Biaya Yang Tidak Dapat Dibebankan Sebagai Biaya (Non-Deductible Expenses)**

Adalah pengeluaran/ beban/ biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak atas pengeluaran dilakukan tidak dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Oleh karena itu, pengeluaran yang melampaui batas kewajaran yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, biaya yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya adalah sebagai berikut:

- (1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
  - a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan sisa hasil usaha koperasi.
  - b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
  - c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
    1. Cadangan piutang tak tertagih untuk Usaha Bank dan Badan Usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.

2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
  3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
  4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
  5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
  6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuannya dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b UU PPh, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf I sampai dengan huruf m UU PPh serta zakat yang

diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

h. Pajak Penghasilan.

i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.

j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.

k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan dan amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

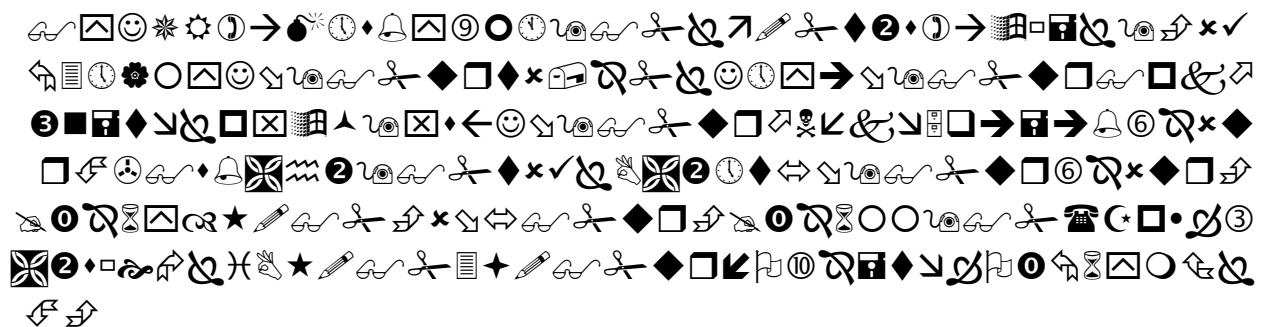
## **2.6 PAJAK MENURUT PANDANGAN ISLAM**

Pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan pada hal penyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Sedangkan pajak menurut Islam adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.

Dalam Islam juga dikenal istilah zakat. Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu.

Alasan kaum muslim dan umat manusia dalam menunaikan kewajiban pajak yang ditetapkan Negara, disamping penunaian kewajiban zakat, antara lain solidaritas sosial dan tolong menolong antara sesama kaum muslimin dan sesama umat manusia dalam kebaikan dan takwa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Daruguthni dari Fatimah binti Qayis, Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain di luar zakat”.

Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60:



Artinya; “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana (Qs. At-Taubah:60)*”.

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat manusia yang wajib dikeluarkan dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya, seperti orang-orang kafir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf, dan orang-orang yang

sedang dalam perjalanan. Dan begitu pula sebaliknya dengan pajak yang merupakan kewajiban yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak kepada pemerintah untuk kepentingan umum.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **3.1 Sejarah Singkat Perusahaan**

PT. Rezki Karya Megatama merupakan salah satu dari sekian banyak perusahaan milik swasta yang terdapat di Daerah Riau. Perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa kontruksi yang meliputi: pembuatan jalan, jembatan, dan bangunan.

Menurut sejarahnya PT. Rezki Karya Megatama didirikan atas notaris Zainal Ardi Sh, No. 60 tertanggal 26 april 2000, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan dalam surat keputusan No. 960/KMK.016/2000, yang berlokasi di Jalan Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi.

Perusahaan yang awal berdirinya sampai saat ini, kegiatannya bergerak dibidang jasa kontraktor. Sebelum diberi nama perseroan terbatas, perusahaan ini berbentuk perseroan komanditer (CV). Dengan pengelolaan yang baik, perusahaan terus berkembang mengikuti perkembangan perekonomian sehingga pemilik perusahaan mengganti bentuk perusahaan menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Maksud dan tujuan dari didirikannya PT. Rezki Karya Megatama adalah sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang, pemborong, pemasangan instalasi-instalasi, pengembangan wilayah pemukiman dan pemborongan pada bidang telekomunikasi.
- b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, termasuk perdagangan lokal, ekspor-impor, perekanan (Leveransir), Supplier, grosir, distributor.



- c. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan, angkutan umum baik orang maupun barang dan menjalankan usaha dalam bidang jasa, kecuali jasa dalam bidang pajak dan hukum.
- d. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian dan perindustrian yang meliputi Industri Rumah Tangga.

### **3.2 Struktur Organisasi**

Keberadaan struktur organisasi di dalam suatu perusahaan sangat penting artinya, terutama dalam hal pencapaian tujuan perusahaan. Struktur organisasi yang memadai pada umumnya bersifat sederhana dan fleksibel serta memperlihatkan secara tegas batas dan tanggung jawab masing-masing bagian yang terdapat pada organisasi itu.

Bentuk struktur organisasi yang paling sering digunakan dan yang paling sederhana adalah bentuk garis atau line. Begitu juga dengan bentuk struktur organisasi yang dimiliki oleh PT. Rezki Karya Megatama. Untuk mengetahui dengan lebih jelas mengenai bentuk dan susunan struktur organisasi perusahaan ini, dapat dilihat gambar III.I.



Berikut ini diuraikan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam struktur organisasi PT. Rezki Karya Megatama secara garis besar.

1) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas mengawas aktivitas perusahaan yang dipimpin oleh direktur. Komisaris mempunyai hak untuk mengangkat dan memberhentikan Direktur melalui rapat pemegang saham. Disamping itu, dewan komisaris juga berhak untuk memeriksa pembukuan, dokumen-dokumen dan harta kekayaan perusahaan.

2) Direktur

Tugas dan Tanggung jawab direktur adalah meliputi:

- a. Melaksanakan program kerja yang disusun.
- b. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan semua kegiatan disemua departemen.
- c. Menggantikan direktur utama perusahaan apabila direktur utama berhalangan dalam melaksanakan suatu tugas yang dibebankan kepadanya.
- d. Meminta pertanggungjawaban kepada masing-masing kepala bagian atas pelaksanaan tugas yang telah dijalankan,
- e. Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada direktur utama perusahaan.

3) Kepala Bagian Keuangan

Kepala bagian keuangan membawahi sub bagian:

- a. Staf pembukuan
- b. Pajak
- c. Kasir

Tugas dan tanggung jawab kepala bagian keuangan adalah, meliputi:

- a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pencatatan dan administrasi keuangan.

- b. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas akuntansi dan keuangan perusahaan.
- c. Mengawasi pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran barang dan gudang.
- d. Mengawasi pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh kasir perusahaan.
- e. Mengkoordinasikan pembuatan laporan dan hasil kerjanya serta mempertanggungjawabkan kepada direktur perusahaan.

4) Kepala bagian personalia meliputi:

- a. Melaksanakan program kerja yang dibebankan direktur perusahaan.
- b. Melaksanakan administrasi yang berhubungan dengan karyawan perusahaan.
- c. Mengawasi pelaksanaan tugas yang dilakukan satpam dan staf administrasi perusahaan.
- d. Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya pada direktur perusahaan.

5) Kepala bagian peralatan, meliputi:

Bagian ini tugasnya, meliputi:

a. Bagian Bengkel

Bertugas mengatur jadwal perawatan peralatan, materi yang dibutuhkan untuk perawatan serta menyusun tenaga kerja yang dibutuhkan untuk perawatan serta menyusun tenaga kerja yang dibutuhkan untuk perawatan tersebut.

b. Bagian Transportasi

Bertugas mengawasi jalannya operasi transportasi dalam rangka menunjang kegiatan operasional perusahaan.

c. Bagian Gudang dan Alat

Bertugas mengawasi peralatan di gudang dan mengkoordinir penggunaan alat-alat.

### **3.3 Aktivitas Perusahaan**

Aktivitas perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kelancaran perusahaan dengan aktivitas perusahaan yang lancar diharapkan akan dapat mendorong tercapainya tujuan perusahaan yang secara efektif dan efisien dalam usaha meningkatkan hasil yang optimal.

Adapun aktivitas perusahaan yang ada di perusahaan konstruksi antara lain pembangunan perumahan, pemukiman, jalan, jembatan, gedung, pabrik, gorong-gorong landasan, pengeboran dan pekerjaan-pekerjaan umum lainnya. Dalam pembangunan tersebut, perusahaan akan menggunakan material, pekerjaan alat pendukung lainnya untuk kelancaran pelaksanaan proyek. Untuk material, biasanya bisa didapat secara langsung dari Daerah Kabupaten Kuantan Singingi itu sendiri. Begitu juga dengan pekerjaannya karena untuk kebutuhan material dan pekerja di daerah tersebut cukup banyak tersedia. Disana sudah banyak toko-toko bangunan yang menjual bahan-bahan untuk keperluan pembangunan. Dan untuk pekerjaanya juga tidak sedikit yang ahli dalam pelaksanaan pembangunan proyek tersebut. Sedangkan untuk alat pendukungnya seperti alat-alat berat, biasanya perusahaan akan menyewa di perusahaan yang menyediakan alat-alat berat.

Jumlah perusahaan yang menyewakan alat-alat berat tersebut masih sangat sedikit, begitu juga dengan penyediaan alat-alat beratnya yang masih terbatas. Jika alat berat itu tidak ada pada saat diperlukan maka perusahaan konstruksi akan menyewa di daerah lain. Hal ini akan menjadi sedikit masalah bagi perusahaan karena dari segi jarak dan waktu akan mengakibatkan lamanya penyewaan alat berat tersebut.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Perhitungan Laba Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan**

Laporan Laba Rugi merupakan laporan yang disajikan oleh perusahaan yang berfungsi mengukur kinerja keuangan selama suatu periode tertentu. Kinerja tersebut ditunjukkan dengan adanya pendapatan dikurangi dengan beban-beban yang terkait. Laporan perhitungan laba rugi mengikhtisarkan pendapatan yang diperoleh dan beban yang diperhitungkan selama jangka waktu tertentu dalam periode operasi perusahaan.

##### **1. Pendapatan**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007), Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Adapun jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh PT. Rezki Karya Megatama selama tahun 2012 adalah sebesar Rp. 3.395.213.112,- Ini dapat dilihat pada laporan laba rugi perusahaan periode 31 Desember 2012.

##### **2. Beban**

PT. Rezki Karya Megatama merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa kontruksi yang meliputi pembuatan jembatan, jalan, bangunan, gorong-gorong landasan dan pekerjaan umum lainnya. Berikut ini uraian dari Neraca dan bermacam-macam

beban operasional yang disajikan dalam laporan laba rugi periode januari sampai dengan desember 2012 sebagai berikut:

**Tabel IV.1: Perhitungan Beban Operasional**

<b>Beban-Beban</b>	
Beban Gaji	Rp. 138.100.000,00
Beban Sewa	Rp. 4.335.000,00
Beban Adm Kantor	Rp. 5.328.000,00
Beban Perjalanan	Rp. 16.350.000,00
Beban Listrik & Telepon	Rp. 5.138.000,00
Beban Alat Tulis Kantor	Rp. 10.547.000,00
Beban Sumbangan	Rp. 3.763.000,00
Beban Rumah Tangga Kantor	Rp. 4.659.000,00
Beban Transportasi	Rp. 17.880.000,00
Beban Perbaikan & Pemeliharaan	Rp. 20.544.000,00
Beban Entertainment	Rp. 13.456.000,00
<b>Jumlah Beban Operasional</b>	<b>Rp. 240.100.000,00</b>

**Tabel IV.2 : Ringkasan Laporan Rugi laba**

Pendapatan	Rp 3.395.213.112,00
Harga Pokok Pendapatan	<u>Rp 2.670.000.000,00</u>
Laba Kotor	Rp 725.213.112,00
Biaya Operasil	<u>Rp 240.100.000,00</u>
Laba Sebelum Pajak	Rp 485.113,112,00
PPh Terhutang	<u>Rp 67.915.820,00</u>
Laba Setelah Pajak	Rp 417.197.292,00

Untuk perhitungan PPh badan yang diterapkan oleh PT. Rezki Karya Megatama dalam menentukan laba bersih tahun 2012 dalam hal Wajib Pajak badan ( PPh pasal 25 ) tidak dengan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan yaitu sebesar 25%, tetapi perusahaan menggunakan tarif 14%.

Jumlah laba sebelum pajak yang diperoleh perusahaan yaitu sebesar Rp 485.113.112,-. Sehingga pajak penghasilan yang dihitung oleh perusahaan adalah sebesar:

PPh dihitung  $\text{Rp } 485.113.112,- \times 14\% = \text{Rp } 67.915.820,-$

Jadi, jumlah pajak terhutang menurut laporan komersial adalah Rp 67.915.820,-.

## **4.2 Koreksi Fiskal**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ditemukan beberapa koreksi fiskal pada laporan keuangan laba rugi sebelum dilakukan laba kena pajak diantaranya adalah:

### **1. Biaya Perjalanan Wisata**

Biaya perjalanan wisata PT. Rezki Karya Megatama adalah sebesar Rp. 7.863.000,- yang digunakan untuk kepentingan pemimpin dan karyawan-karyawan di perusahaan, yang berbentuk natura dan kenikmatan. Menurut UU Pasal 9 Ayat (1) huruf e yang berisi penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan tidak diperkenankan sebagai biaya pengurang Penghasilan Kena Pajak. Biaya ini tidak dapat diakui sebagai biaya perusahaan dan tidak dapat dibebankan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak.

### **2. Biaya Sumbangan**

Biaya sumbangan PT. Rezki Karya Megatama adalah sebesar Rp. 3.763.000,- yang diberikan kepada orang yang meminta sumbangan ke perusahaan, akan tetapi perusahaan memasukkan biaya tersebut sebagai pengurang dari Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan menurut UU PPh



pasal 9 ayat (1) huruf g biaya sumbangan tersebut tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak. Adapun isi dari Pasal 9 ayat (1) huruf g tersebut adalah tentang biaya yang tidak dapat dibebankan antara lain harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b UU PPh, kecuali sumbangan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf I sampai dengan huruf m UU PPh serta zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterimah oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip *deductability* dan *non-deductability*, penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Penghasilan, bagi Wajib Pajak sebagai pemberi bantuan atau sumbangan dan harta hibah tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

### 3. Biaya Entertainment

Biaya Entertainment PT. Rezki Karya Megatama adalah sebesar Rp. 13.456.000,-. Biaya entertainment yang dimiliki oleh perusahaan tersebut berbentuk biaya reparasi, jamuan dan sejenisnya. Adapun isi dari Pasal 6 ayat (1) huruf n tersebut adalah biaya entertainment dan sejenisnya sering juga dibuat dengan biaya reparasi, jamuan, dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Pembebanan biaya-biaya tersebut dengan SE Dirjen Pajak No. 27 Tahun 1986 dapat dibebankan sebagai biaya dengan syarat Wajib Pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungan dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan. Syarat-syarat formal yang

harus dipenuhi terhadap biaya-biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan, yaitu Wajib Pajak harus melampirkan daftar nominatifnya pada Surat Pemberitahuan Tahunan seperti berikut:

- 1) Nomor Urut
- 2) Tanggal entertainment dan sejenisnya yang diberikan
- 3) Nama tempat Entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan
  - a. Alamat “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan
  - b. Jenis “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan
  - c. Jumlah (Rp) “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan
- 4) Relasi usaha yang telah diberikan “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan:
  - a. Nama
  - b. Posisi
  - c. Perusahaan
  - d. Jenis Usaha

Dari laporan Surat Pemberitahuan (SPT) PT. Rezki Karya Megatama ternyata tidak melampirkan daftar nominatif tersebut. Oleh karena itu, PT. Rezki Karya Megatama harus melakukan koreksi fiskal positif.

Dibawah ini penulis akan melampirkan laporan koreksi fiskal atas laporan komersial yang dibuat oleh perusahaan pada Tabel IV.3.

**Tabel IV.3 : Laporan Koreksi Fiskal Laba Rugi**

<b>Keterangan</b>	<b>Laporan Komersial</b>	<b>Koreksi Positif</b>	<b>Koreksi Negatif</b>	<b>Laporan Fiskal</b>
<b>Pendapatan</b>	<b>Rp 3.395.213.113,-</b>			<b>Rp 3.395.213.113,-</b>
<b>HPP</b>	<b>Rp 2.670.000.000,-</b>			<b>Rp 2.670.000.000,-</b>
<b>Laba Kotor</b>	<b>Rp 725.213.112,-</b>			<b>Rp 725.213.112,-</b>
<b>Beban-Beban</b>				
Beban Gaji	Rp 138.100.000,-			Rp 138.100.000,-
Beban Sewa	Rp 4.335.000,-			Rp 4.335.000,-
Beban Adm Kantor	Rp 5.328.000,-			Rp 5.328.000,-
Beban Perjalanan	Rp 16.350.000,-	Rp 7.863.000,-		Rp 8.487.000,-
Beban Listrik & Telpon	Rp 5.138.000,-			Rp 5.138.000,-
Beban ATK/Foto copy	Rp 10.547.000,-			Rp 10.547.000,-
Beban Sumbanga	Rp 3.763.000,-	Rp 3.763.000,-		
Beban RT Kantor	Rp 4.659.000,-			Rp 4.659.000,-
Beban Transportasi	Rp 17.880.000,-			Rp 17.880.000,-
Beban Perbaikan	Rp 20.544.000,-			Rp 20.544.000,-
Beban Entertainment	Rp 13.456.000,-	Rp 13.456.000,-		
<b>Jumlah Beban Operasi</b>	<b>Rp 240.100.000,-</b>			<b>Rp 215.018.000,-</b>
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>Rp 485.113.112,-</b>			<b>Rp 510.195.112,-</b>
<b>Laba Terhutang</b>	<b>Rp 67.915.820,-</b>			<b>Rp 127.548.778,-</b>
<b>Laba Setelah Pajak</b>	<b>Rp 417.197.292,-</b>			<b>Rp 382.646.334,-</b>

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan hasil dari laporan koreksi fiskal yang menunjukkan adanya pengurangan biaya sehingga perusahaan memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp 510.195.112,-. Sedangkan laba sebelum pajak menurut perhitungan perusahaan sebesar Rp 485.113.112,-. Jika dibandingkan dengan perhitungan laporan keuangan komersil dengan laporan fiskal maka diperoleh selisih sebesar Rp 25.082.000,-.

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan diatas maka jelaslah bahwa di dalam melaksanakan akuntansi pajak penghasilan pada PT. Rezki Karya Megatama Taluk Kuantan, ternyata pihak perusahaan belum melaksanakannya sesuai dengan ketentuan atau Undang-

Undang Perpajakan yang berlaku. Hal ini terlihat dari penyusunan laporan rugi laba, yang menunjukkan terdapatnya perbedaan dalam penentuan biaya dan pendapatan antara catatan akuntansinya dengan menurut perpajakan, sehingga bilamana perusahaan memperoleh laba maka akan terdapat perbedaan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan laba kena pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Sehingga bilamana perusahaan memperoleh laba atau menderita kerugian maka akan terdapat perbedaan dalam penyampaian surat pemberitahuan PPh Badan antara besarnya pajak menurut catatan akuntansinya dengan laba kena pajak berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Dengan laporan keuangan fiskal diperoleh laba sebesar Rp 510.195.112,- yaitu pajak yang harus dibayar menurut Undang-Undang Perpajakan. Maka tarif pembebanan Pajak Badan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

$$\text{PPh terhitung} \quad \text{Rp 510.195.112,-} \times 25\% = \text{Rp 127.548.778,-}$$

Jadi, jumlah pajak terhutang menurut laporan fiskal adalah sebesar Rp 127.548.778,-.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan jumlah pajak yang harus dibayar menurut Undang-Undang Perpajakan adalah sebesar Rp 127.548.778,- atau terdapat selisih sebesar Rp 59.632.958,- dari jumlah pajak yang harus dibayar menurut akuntansi.

#### **4.3 Penyajian Dalam Laporan Keuangan**

Dalam penyusunan laporan keuangan, maka setiap perusahaan harus mencantumkan besarnya beban pajak penghasilan setiap periode akuntansi dalam laporan perhitungan laba rugi dan besarnya jumlah angsuran pembayaran serta hutang pajak sampai akhir periode akuntansi

dalam daftar neraca perusahaan, sehingga informasi keuangan yang disampaikan menjadi wajar, berikut ini dikemukakan penyajian pajak penghasilan dalam laporan keuangan.

### **1. Penyajian Laba Tahun Berjalan**

Besarnya jumlah Laba Tahun Berjalan yang diperhitungkan PT. Rezki Karya Megatama untuk tahun 2012 adalah sebesar Rp 417.197.292,-. Dikarenakan PT. Rezki Karya Megatama menghitung besarnya jumlah Laba Tahun Berjalan dengan cara mengurangi jumlah laba sebelum pajak sebesar Rp 485.113.112,- dengan jumlah PPh Terhutang sebesar Rp 67.915.820,- dengan menggunakan tarif 14% dalam perhitungan namun perusahaan tidak menggunakan tarif 25% sesuai dengan tarif Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

### **2. Penyajian Pajak Penghasilan Pada Perhitungan Laba Rugi**

Berdasarkan hasil pembahasan bahwa dalam melaksanakan akuntansi pajak penghasilan PT. Rezki Karya Megatama, ternyata perusahaan belum melaksanakan sesuai dengan ketentuan atau undang-undang yang berlaku. Hal ini terlihat dari penyusunan laba rugi yang menunjukkan terdapatnya perbedaan dalam penentuan biaya dan pendapatan yang dihitung perusahaan menurut ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, laporan perhitungan laba rugi yang disusun PT. Rezki Karya Megatama harus melakukan koreksi fiskal terhadap komponen-komponen biaya-biaya operasi.

Dengan adanya pengoreksian atau penyesuaian tersebut, mengakibatkan jumlah beban pajak penghasilan meningkat dan laba bersih setelah pajak yang diperoleh pihak perusahaan menurun, untuk penjelasannya penulis sajikan perhitungan laba rugi sebelum pajak dan sudah koreksi fiskal.

<b>Keterangan</b>	<b>Lap.Komersial</b>	<b>Lap. Fiskal</b>	<b>Beda</b>
Laba sebelum pajak	Rp 485.113.112,-	Rp 510.195.112,-	Rp 25.082.000,-
Pajak Penghasilan	<u>Rp 67.915.820,-</u>	<u>Rp 127.548.778,-</u>	<u>Rp 59.632.958,-</u>
Laba Setelah Pajak	Rp 417.197.292,-	Rp 382.646.334,-	Rp 34.550.958,-

Dari uraian diatas seharusnya perusahaan menyajikan jumlah pajak penghasilan sebesar Rp 127.548.778,- dan laba bersih setelah pajak sebesar Rp 382.646.334,-.

## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan uraian teoritis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis akan mencoba membuat beberapa kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi perkembangan perusahaan ke depan, terutama dalam laporan pajak penghasilan.

#### 5.1 Kesimpulan

1. PT. Rezki Karya Megatama Taluk Kuantan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa kontraktor.

Dalam melakukan penyusunan laporan laba rugi sebagai penentuan besarnya pajak penghasilan, ternyata PT. Rezki Karya Megatama Taluk Kuantan belum melaksanakannya sesuai dengan ketentuan undang-undangan yang berlaku umum, dimana dalam laporan pajak dan laporan laba fiskalnya perusahaan belum memperhitungkan biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh Undang-Undang Perpajakan.

2. Permasalahan yang ditemui dalam perusahaan ini adalah dalam Surat Setoran Pajak (SSP), perusahaan tidak menyetorkan angsuran PPh Pasal 25 Badan sesuai dengan jumlah yang ada dalam laporan laba rugi maupun Surat Pemberitahuan (SPT).

Sehinggaketentuan yang sepertiinitentusajtidaksesuaidenganprinsipakuntansi yang berlakuumum.

3. DalamlaporanperhitunganPajakPenghasilan PT. RezkiKaryaMegatama, didalambiayaperjalanan,

perusahaanmemasukkanbiayaperjalananwisata sebesarRp 7.863.000,- yang menurut UU PPhPasal 9 ayat (1) huruf e biayatersebuttidakdapatdikurangkandariPenghasilanKenaPajak karenabiaya tersebutadalahbiayanatura. Perusahaan

jugamemasukkanbiayasumbangansebesarRp 3.763.000,- yang menurut UU PPhPasal 9 ayat (1) huruf g biayatersebutjugatidakbisadikurangkandariPenghasilanKenaPajak.

4. PT. RezkiKaryaMegatamajugamemasukkanbiaya entertainment sebesarRp 13.456.000,- sebagaipengurangPenghasilanKenaPajak yang menurut UU PPhPasal 6 ayat (1) biayatersebutbolehdikurangkan, apabilaWajibPajakmembuatdaftarnominatifdalamSuratPemberitahuan (SPT). PT.

RezkiKaryaMegatamatidakmelaporkandaftarnominatifsehinggabiayatersebut tidakbolehdikurangkandariPenghasilanKenaPajak.

## 5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapatpenuliskemukakandisiniadalahsebagiberikut:

1. Laporankeuanganperusahaan yang disusunolehperusahaantidaksesuaidengandasarperhitunganpajakpenghasila



nkarena adanya perbedaan-perbedaan dalam perhitungan yang menyebabkan terjadinya ketidakcocokan antara laporan keuangan perusahaan yang dibuat berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan laporan keuangan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Oleh karena itu, perlu adanya koreksi fiskal terhadap laporan keuangan perusahaan.

2. Dalam menghitung PPh terutang sebaiknya perusahaan menggunakan tarif yang sesuai dengan Ketentuan Perpajakan yang berlaku dan dalam mencantumkan dan menyetorkan PPh terutang tersebut perusahaan harus sesuai dengan jumlah pajak yang ada sehingga tidak membingungkan pemakai laporan keuangan tersebut.
3. Mengingat bahwa peraturan perpajakan di Indonesia sering mengalami perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan perekonomian, diharapkan perusahaan dan pihak-pihak perusahaan terus mengikuti perkembangan tersebut dengan cara mencari informasi ke Kantor Pelayanan Pajak tersebut.
4. Dengan menyadari pentingnya informasi perpajakan yang ada, maka perusahaan dituntut untuk mempelajarinya karena setiap pelanggaran atau kealpaan perusahaan sebagai Wajib Pajak akan dikenakan sanksi-sanksi yang dapat merugikan perusahaan itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran surat At-Taubah Ayat 60

Erly, Suandy, 2011. Perencanaan Pajak. Penerbit Salemba Empat. Edisi 5. Yogyakarta

Harahap, Sofian Safri, 2004. Analisis Atas Laporan Keuangan. Edisi 1. PT. Gramedia, Jakarta

Ikatan Akuntansi Indonesia, 2007. Standar Akuntansi Indonesia. Penerbit Salemba Empat. Jakarta

Muhammad Zain, 2007. Manajemen Perpajakan. Penerbit Salemba Empat. Jakarta

Mardiasmo, 2009. Perpajakan. Edisi Revisi 2009. Penerbit Andi. Yogyakarta

\_\_\_\_\_, 2011. Perpajakan. Edisi Revisi 2011. Penerbit Andi. Yogyakarta

Manurung, Elvy Maria, 2011. Akuntansi Dasar. Penerbit Erlangga. Yogyakarta

Muljono, Djoko, 2009. Akuntansi Pajak Lanjutan. Penerbit Andi. Yogyakarta

Pardiat, 2010. Akuntansi Pajak. Edisi 7. Penerbit Mitra Wacana Media. Jakarta

Primandita, Fitriandi, 2011. Komplikasi Undang-Undang Perpajakan. Edisi Terbaru. Penerbit Salemba Empat. Jakarta

Purwono, Herry, 2010. Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak. Penerbit Erlangga. Jakarta

Rudi, Suhartono, Wirawan B. Ilyas, 2010. Ensiklopedia Perpajakan Indonesia. Penerbit Salemba Empat. Jakarta

Sadeli, H. Lili, 2010. Dasar-Dasar Akuntansi. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta

Sigit Ibnu Pawoko, 2009. Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) 2007. Penerbit Salemba Empat. Jakarta

Siti Resmi, 2009. Perpajakan: Teori dan Kasus. Buku 1. Edisi 5. Penerbit Salemba Empat. Jakarta

Sukrisno Agoes dan Estralisa Trisnawati, 2012. Akuntansi Perpajakan. Edisi 2 Revisi. Jakarta

Waluyo, 2009. Akuntansi Pajak. Penerbit Salemba Empat. Jakarta

\_\_\_\_\_, 2010. Akuntansi Pajak. Penerbit Salemba Empat. Jakarta